

HUBUNGAN KETERSEDIAAN ALAT KONTRASEPSI DENGAN PERILAKU PENGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATAKTE

¹Mili Arthanedi Jumetan, ¹Arman Riffat Lette, ¹Aysanti Yuliana Paulus

¹Program Studi Kebidanan Universitas Citra Bangsa, Kupang, Indonesia

Email: miliarthanedi@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu tujuan dari program Keluarga Berencana (KB) adalah menjarangkan kehamilan dengan menggunakan metode kontrasepsi untuk pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. Keberhasilan pelayanan keluarga berencana dapat dicapai melalui dukungan oleh anggota masyarakat dengan berpartisipasi secara aktif sebagai peserta KB atau akseptor KB. Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Berdasarkan data (BPS, 2019).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan rancang bangun *cross sectional study*. Analisis data menggunakan analisis univaria dan bivariat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *random sampling* yaitu 100 orang akseptor KB aktif desa Lifuleo, Tesabela dan Oenesu tahun 2021. Analisis data ini menggunakan uji *Chi-square* dengan nilai α 0,005.

Hasil: karakteristik umur menunjukkan bahwa 51 % responden ada dalam golongan umur sehat, sebagai besar responden memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu 58%, variable ketersediaan alkon sebagai besar responden menjawab selalu tersedia yaitu 60%, responden yang memilih jarak tempuh ke fasilitas kesehatan > 20 menit yaitu 100% atau semua responden, sedangkan menurut status peserta KB sebagian besar responden dengan status peserta Non-MKJP yaitu 63 % .

Simpulan: Ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan perilaku penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dengan p Value= 0,012 (< 0,05) sedangkan untuk variable ketersediaan alat kontrasepsi tidak ada hubungan dengan perilaku penggunaan MKJP dengan p Value= 0,735 (> 0,05).

Kata Kunci: MKJP, Pendidikan, Ketersediaan Alat Kontrasepsi

Abstract

One of the objectives of the Family Planning (KB) program is to space pregnancies by using contraceptive methods for pregnancy prevention and family planning. The success of family planning services can be achieved through support from community members by actively participating as family planning participants or family planning acceptors. Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi (BPS, 2019).

This type of research is a quantitative research using descriptive analytic method with a cross sectional study design. Data analysis used univariate and bivariate analysis. Data analysis used univariate and bivariate analysis. The sample in this study was 100 people. The sampling technique in this study was random sampling, namely 100 active family planning acceptors in the villages of Lifuleo, Tesabela and Oenesu in 202. This data analysis uses the Chi-square test with an α value of 0.005.

Results: age characteristics show that 51% of respondents are in the healthy age group, most of the respondents have a low level of education, namely 58%, the variable availability of alkon most of the respondents answered that it is always available, namely 60%, respondents who choose the distance to a health facility > 20 minutes namely 100% or all respondents, while according to the status of family planning participants most of the respondents were with Non-MKJP participant status, namely 63%.

Conclusion: There is a significant relationship between education level and the behavior of using Long-Term Contraceptive Methods with p Value = 0.012 (<0.05) while for the variable availability of contraceptives there is no relationship with the behavior of using MKJP with p Value = 0.735 (> 0.05).

Keywords: MKJP, Education, Availability of Contraceptives

PENDAHULUAN

Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat khususnya Kesehatan Ibu yang setinggi-tingginya adalah salah satu agenda pembangunan yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*). Hal tersebut juga sejalan dengan Agenda Prioritas pemerintah yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Salah satu tujuan dari program Keluarga Berencana (KB) adalah menjarangkan kehamilan dengan menggunakan metode kontrasepsi untuk pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga (Sulistiyawati, 2011).

Pemerintah selalu mengupayakan berbagai hal untuk pembangunan penduduk yang berkualitas salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Upaya peningkatan kualitas hidup dalam masyarakat ini dapat terwujud

salah satunya melalui program Keluarga Berencana (KB) bagi pasangan usia subur yang mana tujuannya adalah agar kehamilan dapat diatur sesuai keinginan dari pasangan.

Keberhasilan pelayanan keluarga berencana dapat dicapai melalui dukungan oleh anggota masyarakat dengan berpartisipasi secara aktif sebagai peserta KB atau akseptor KB. Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Berdasarkan data (BPS, 2019) secara nasional presentase perempuan berumur 15-49 tahun yang tidak menggunakan alat KB dengan beberapa alasan yaitu alasan fertilitas 26.88%, tidak setuju KB 2.22%, tidak tahu alat atau cara KB 0.14%, takut efek samping 18.07%, lainnya 49.40%, dan tidak tahu 3.29%. Sedangkan untuk provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri alasan fertilitas 34.31%, tidak setuju KB 2.85%, Takut efek samping 31.66%, dan lainnya 30.32%.

Nusa Tenggara Timur (NTT) sendiri penggunaan alat kontrasepsi adalah MOW 19.41%, MOP 0.92%, 18.74%, 37.84%, Suntikan 86,39%, Pil 14.8% dan kondom 0.29% (BPS, 2019). Berdasarkan Laporan Bulanan Kantor BKKBN Provinsi NTT bulan Desember tahun 2021 didapatkan jumlah Peserta KB aktif Kabupaten Kupang yaitu 28.475 peserta. Dengan rincian pemakaian alat kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non Jangka Panjang (Non MKJP) yaitu IUD 1.152 (4.04%), MOW 1564 (5.49%), MOP 28 (0.09%), Kondom 164 (0.57%), Implant (26.85%), Suntik 15976 (56.10%), dan Pil 1944 (6.82%) (BKKBN Provinsi, 2019). Status peserta KB di wilayah kerja Puskesmas Batakte masih didominasi oleh penggunaan metode non MKJP diantaranya (Suntikan dan Pil). Dari jumlah total peserta KB aktif pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1603 peserta hanya 352 atau hanya sekitar 3,3% pengguna MKJP. Dari 12 desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Batakte terdapat tiga desa dengan cakupan MKJP yang rendah (tiga terendah), yaitu desa Oenesu dengan presentasi pengguna MKJP yaitu 12%, Tesabela sebesar 16,5% dan Lifuleo dengan presentasi pengguna MKJP yaitu 6,7%.

Program KB pada semestinya sudah ada sejak lama, namun pada saat ini masih juga mengalami kendala oleh karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi peserta KB menggunakan kontrasepsi antara lain faktor predisposisi (umur, pendidikan, pengetahuan, jumlah anak), faktor pemungkin (ketersediaan alat kontrasepsi) serta faktor pendorong seperti adanya dukungan dari suami, serta adanya

dukungan dari petugas kesehatan) (Rizali dkk, 2013).

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan desain *cross sectional*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ketersediaan alat kontrasepsi sedangkan variabel dependennya adalah perilaku penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akseptor KB yang ada di wilayah kerja puskesmas Batakte khususnya di desa Oenesu, Lifuleo, dan Tesabela yang mana 3 desa tersebut memiliki cakupan MKJP terendah. Jumlah populasi pada penelitian ini yaitu 306 akseptor KB. Jenis pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *Propotionate stratified random sampling*. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang telah dilakukan uji validitas dan realibilitas. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji *chi square* ($\alpha=0,05$).

HASIL

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Tabel 1 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan, Umur dan Jarak Tempuh ke Fasilitas Kesehatan

Tabel 1

Karakteristik	Frekuensi	%
Tingkat Pendidikan		
Tinggi (S1-S3)	2	1
Sedang (SMP-SMA)	46	54
Rendah (Tidak sekolah – SD)	52	45
Umur		
Sehat (20-35 tahun)	51	51
Tidak Sehat (< 20 dan > 35 tahun)	49	49
Jarak Tempuh		
Cepat(< 20 Menit)	0	0
Lama (>20 menit)	100	100
Ketersediaan Alkon		
Selalu tersedia	96	96
Kadang tersedia	4	4
Status Penggunaan MKJP		
MKJP	37	37
Non MKJP	63	63

Berdasarkan Tabel karakteristik responden dalam penelitian ini dapat terlihat yaitu karakteristik tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah status pendidikannya rendah (Tidak sekolah – SD) yaitu sebanyak 52 (52%) responden. Karakteristik umur dalam penelitian ini tergambar yang paling banyak adalah usia reproduksi sehat yaitu 20-35 tahun yaitu sebanyak 51 (51%) responden. Sedangkan karakteristik berikutnya yaitu jarak tempuh akseptor ke fasilitas kesehatan yang mana 3 desa sebagai tempat penelitian ini memiliki jarak tempuh lama yaitu membutuhkan waktu > 20 menit sampai ke Puskesmas sebagai

fasilitas layanan kesehatan pertama untuk mendapatkan pelayanan MKJP. Karakteristik responden berdasarkan variabel Ketersediaan Alat Kontrasepsi di fasilitas Kesehatan menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 60% responden mengatakan alat kontrasepsi selalu tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Variabel berikutnya yaitu variabel status penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menunjukkan bahwa yang terbanyak responden memiliki status Non-MKJP yaitu sebanyak 63%.

ANALISIS BIVARIAT

Tabel 2 Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Ketersediaan Alat Kontrasepsi dengan Perilaku Penggunaan MKJP

Variabel	Non MKJP		MKJP		Nilai <i>p</i>
	N	%	N	%	
Tingkat Pendidikan					
Rendah TS dan SD	43	68,2	14	2,0	0,012
Sedang SMP-SMA	19	30,2	22	41,0	
Tinggi PT	1	1,6	1	57,0	
Ketersediaan Alat Kontraasepsi					
Kadang-kadang	26	41,3	14	37,8	0,735
Selalu	37	58,7	23	62,2	

PEMBAHASAN

Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan hasil uji analisis bivariat variabel tingkat pendidikan dari responden terbukti memiliki pengaruh yang bermakna terhadap penggunaan MKJP pada wilayah kerja Puskesmas Batakte dimana hasil uji statistic, diketahui *p value* = 0,012. Berdasarkan hasil analisis bisa kita lihat bahwa pendidikan

mempengaruhi kerelaan untuk memilih metode kontrasepsi yang ingin digunakan. Pendidikan seseorang dapat mendukung atau mempengaruhi tingkat pengetahuan, dan taraf pendidikan yang rendah selalu bergandengan dengan informasi dan pengetahuan yang terbatas, dalam hal ini bisa kita lihat pada kelompok ibu yang menggunakan non MKJP memiliki pendidikan yang rendah lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang menggunakan MKJP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Laksmi, 2017) yang menunjukkan bahwa Pada variabel pendidikan juga terdapat hubungan yang signifikan dengan nilai $p = 0,027$ dan $OR = 1,2$ ($95\%CI = 1,02-1,5$) yang berarti bahwa pada wanita yang berpendidikan tinggi memiliki 1,2 kali peluang lebih tinggi untuk menggunakan MKJP daripada wanita yang berpendidikan rendah.

Selain itu hasil penelitian yang dilakukan di Kota Gondar Barat Laut Etiopia menunjukkan dalam penelitian ini, prevalensi keseluruhan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang dan permanen adalah 34,7% ($95\% CI: 29,5-39,9$). Menurut analisis regresi logistik multivariabel, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang dan permanen secara signifikan berhubungan dengan wanita yang memiliki pendidikan menengah Pertama, perguruan tinggi, dan pendidikan menengah atas, riwayat penggunaan sebelumnya, dan informasi tentang MKJP (Zenebe, C.B., Adefris, M., Yenit, M.K. & Al, 2017).

Pendidikan berhubungan dengan pengetahuan. Semakin tinggi Pendidikan ibu

maka semakin tinggi pula pengetahuan ibu berkaitan dengan MKJP baik itu cara pemasangannya, efek sampingnya dan keuntungan dari MKJP ini, sehingga kemungkinan atau peluang untuk memilih MKJP sebagai pilihan metode kontrasepsi akan semakin besar. Orang atau individu yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih luas pandangannya dan lebih mudah menerima ide, masukan maupun informasi-informasi yang baru terkait berbagai hal, termasuk juga lebih mudah menerima jenis kontrasepsi jangka panjang dalam hal ini IUD/ Spiral, Implant/susuk, MOW dan MOP.

Ketersediaan Alat Kontraasepsi

Faktor ketersediaan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan terbukti tidak memiliki pengaruh yang bermakna terhadap penggunaan MKJP. pada wilayah kerja Puskesmas Batakte dimana hasil uji statistic, diketahui $p\text{ value} = 0,735$ ($> 0,05$). Walaupun proporsi responden yang menjawab alat kontrasepsi selalu tersedia di fasilitas kesehatan pada kelompok kasus (non MKJP) sebesar 58,7% (37) hampir sama dengan kelompok kontrol (MKJP) yang menjawab selalu tersedia yaitu sebesar 62,2% (23), sedangkan responden yang menjawab kadang-kadang tersedia pada kelompok kontrol (MKJP) yaitu sebesar 41,3% (26) lebih tinggi dari kelompok kasus yaitu 37,8% (14).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rino & Achmad, 2015) yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan MKJP dengan ketersediaan alat kontrasepsi yang mana $p\text{ value} = 1,00$. Penelitian yang sejalan adalah dilakukan oleh Lia Rosa S.,dkk pada tahun

2020 menunjukkan hasil uji statistik ini menggunakan *chi-square* test (*continuity correction* tabel 2 x 2) didapatkan hasil p-value $0,102 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan ketersediaan sarana dan prasarana KB dengan penggunaan alat kontrasepsi IUD di Puskesmas Melati Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 (Lia Rosa Veronika Sinaga, dkk, 2021).

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh (Sidabukke & Siahaan, 2021) yang mendapatkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan (ketersediaan alat kontrasepsi) dengan penggunaan MKJP di Klinik Kesuma Bangsa Kecamatan Perbaungan.

Jika kita melihat pada teori yaitu bahwa Ketersediaan pelayanan alat kontrasepsi terwujud dalam bentuk tersedia atau tidaknya fasilitas atau sarana kesehatan (tempat pelayanan kontrasepsi) yang dapat digunakan oleh PUS maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan alat kontrasepsi pada fasilitas kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas pelayanan KB di wilayah tersebut (Prawiroharjo, 2014).

Alat kontrasepsi jangka panjang yang tersedia di fasilitas kesehatan tidak menjadi jaminan seseorang untuk menggunakan MKJP, oleh karena MKJP digunakan untuk jangka waktu yang lama 3 tahun sampai 10 tahun bahkan untuk MOW dan MOP dilakukan sekali seumur hidup sehingga tidak berpengaruh alat kontrasepsi selalu atau tidak tersedia pada fasilitas kesehatan. Selalu tersedianya MKJP tidak menjadi dasar seseorang untuk menggunakan karena

hal yang membuat seseorang menggunakan MKJP atau tidak adalah pengetahuan orang tersebut tentang MKJP itu sendiri, ataupun informasi yang ia dapat terkait MKJP.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dan perilaku penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebaliknya tidak ada hubungan bermakna antara ketersediaan alat kontrasepsi di pusat pelayanan kesehatan dengan perilaku penggunaan MKJP.

SARAN

Bagi tenaga kesehatan Meningkatkan pelayanan khusus upaya KIE dan penyuluhan kesehatan terkait dengan pengetahuan masyarakat tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang serta Dukungan dari pasangan terhadap penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan sehingga masyarakat lebih menyadari pentingnya penggunaan MKJP. Bagi Masyarakat khususnya akseptor KB Harus memiliki rasa ingin tau yang lebih tentang pentingnya penggunaan MKJP serta lebih aktif mencari informasi yang benar terkait berbagai jenis-jenis kontrasepsi baik itu cara pemasangan, efek samping, efektivitas, dan lama penggunaan dari sumber informasi yang benar baik dari media online, kader KB dan petugas Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/201>

- 9/11/22/1dfd4ad6cb598cd011b500f7/s
tastistik-kesejahteraan-rakyat-
2019.html. 2019
- [2] BKKBN Provinsi, Laporan Bulanan BKKBN Provinsi NTT, 2019
- [3] Laksmi, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Pulau Jawa (Analisis Data SDKI 2012). Jurnal Persada Husada Indonesia, 2017
- [4] Lia Rosa Veronika Sinaga, dkk., Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi IUD pada Akseptor KB di Puskesmas Melati Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Akrib Juara Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 2021
- [5] M.Irwan Rizali, M.Ikhsan, A., dan Ummu Salmah, Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Suntikan di Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makasar, The Indonesia Journal of Public Health, 2013
- [6] Sidabukke, I., & Siahaan, J. M., Hubungan Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan Kb Dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkjp) Di Klinik Kesuma Bangsa Kecamatan Perbaungan Tahun 2020, Jurnal TEKESNOS, 2021
- [7] Sulistyawati, Asuhan kebidanan pada masa kehamilan, Jakarta: Salemba Medika, 2011
- [8] Prawiroharjo, Ilmu Kebidanan, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014
- [9] Zenebe, C.B., Adefris, M., Yenit, M.K., & Al, E, Factors associated with utilization of long-acting and permanent contraceptive methods among women who have decided not to have more children in Gondar city. BMC Women's Health 17. *BMC Women's Health*, 2017